

EVALUASI IMPLEMENTASI SISKEUDES (SISTEM KEUANGAN DESA) ONLINE DI KABUPATEN PATI PADA TAHUN 2018-2020

Kresna Aru Wijayandanu

Email: kresnawijaya666@gmail.com

Dosen Pembimbing: **Dra. Puji Astuti, M.Si**

Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro, Semarang.

Website: <https://fisip.undip.ac.id> – Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES Online merupakan salah satu aplikasi yang mempermudah pemerintah desa didalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten Pati menerapkan Aplikasi SISKEUDES, dengan tujuan agar pengelolaan keuangan desa dapat lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kabupaten Pati termasuk salah satu kabupaten di Indonesia yang berhasil didalam implementasi SISKEUDES Online secara serentak di seluruh desa (401 desa) di Kabupaten Pati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan lebih dalam mengenai Evaluasi Implementasi Aplikasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informan-informan terkait.

Hasil penelitian ini adalah mendeskripsikan berbagai temuan di lapangan terkait Implementasi Aplikasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati yakni dengan diadakannya Bimbingan Teknis secara komunikatif, konsisten, serta jelas kepada seluruh operator dan OPD terkait didalam menggunakan aplikasi SISKEUDES Online, komitmen Pemerintah Kabupaten Pati didalam mengemban fungsi asistensi kepada desa dalam hal pengadaan sarana dan prasarana penunjang implementasi Aplikasi SISKEUDES, serta integritas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pati bersama OPD dan Instansi terkait secara birokratis dan terstruktur dengan baik. Untuk itu diperlukan evaluasi proses didalam mengevaluasi implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati. Didalam proses pelaksanaannya masih ditemukan beberapa faktor yang menjadi penghambat, tapi didalam praktek secara teknis seluruh desa di Kabupaten Pati sudah melakukan proses pelaksanaan mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban yang sudah relevan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dalam menjalankan aplikasi tersebut sudah terstruktur dengan baik.

Kata Kunci: Evaluasi Implementasi, SISKEUDES Online, Keuangan Desa.

ABSTRACT

The Village Financial System application or SISKEUDES Online is an application that makes it easier for village governments to manage village finances. Pati District implements the SISKEUDES application, with the aim of making village financial management more transparent, accountable and accountable in accordance with applicable regulations. Pati District is one of the districts in Indonesia that has succeeded in implementing SISKEUDES Online simultaneously in all villages (401 villages) in Pati District. The purpose of this research is to describe more deeply about the Evaluation of the Implementation of the SISKEUDES Online Application in Pati Regency 2018-2020. This research uses descriptive qualitative research methods with data collection techniques through interviews, and documentation studies conducted on related informants.

The results of this research are to describe the various findings in the field related to the Implementation of the SISKEUDES Online Application in Pati District, namely by providing communicative, consistent, and clear Technical Guidance to all operators and related OPDs in using the SISKEUDES Online application, the commitment of the Pati District Government in carrying out the assistance function to villages in terms of procurement of facilities and infrastructure to support the implementation of the SISKEUDES application, as well as the integrity of the Pati District Government with OPD and related agencies in a bureaucratic and well-structured manner. For this reason, it is necessary to evaluate the process in evaluating the implementation of SISKEUDES (Village Financial System) Online in Pati District. In the implementation process, several factors were still found to be obstacles, but in technical practice all villages in Pati District have carried out the implementation process starting from planning to accountability that is relevant in accordance with applicable regulations and in running the application it is well structured.

Keyword: Implementation Evaluation, SISKEUDES Online, Village Finance.

PENDAHULUAN

Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015). Berkaitan dengan peran tersebut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negarakesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Desa telah memberikan kewenangan yang sangat besar kepada desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri dengan tujuan untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa (Faozi, 2015). Ditetapkannya pedoman umum dalam tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa yakni memberikan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, yaitu pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum,

skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat desa mempunyai beberapa sumber pendapatan terdiri dari pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP Nomor 60 Tahun 2014), yang dimana sumber pendapatan tersebut dikelola oleh pihak yang berwenang dan bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan desa. Beberapa pihak yang terlibat dalam perencanaan dan penganggaran desa adalah kepala desa dan perangkatnya, BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Perencanaan Masyarakat Desa) dan perwakilan kelompok masyarakat desa yang mana perencanaannya harus disusun dengan bersama masyarakat desa karena dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Perihal pengelolaan keuangan, pemberian kewenangan atas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan adanya Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mendukung dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Pati.

Perlu adanya kesiapan pemerintah desa dalam implementasi peraturan baru yang berlaku agar semua berjalan sesuai aturan yang berlaku dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan pembangunan di desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menjadikan negara kuat dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lain.

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup yang semakin berkualitas, oleh karena itu kesejahteraan merupakan nilai utama yang selalu diupayakan untuk dapat diwujudkan oleh setiap manusia. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Pada pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDDesa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus

pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Selain itu, pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya. Namun demikian, peran dan tanggung jawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Kendala umum lainnya yaitu desa belum memiliki prosedur serta dukungan sarana dan prasarana dalam pengelolaan keuangannya. Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa memiliki risiko yang cukup tinggi dalam pengelolaannya, khususnya bagi aparat pemerintah desa. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Oleh karena itu, sebagaimana diamanatkan dalam UU Desa, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota turut membantu memberdayakan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa. Pertanggungjawaban kepala desa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang dihasilkan melalui proses akuntansi yang merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan publik (Tanjung, 2000). Laporan realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pertama, laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang harus disampaikan paling lambat Bulan Juli tahun berjalan, kedua, laporan semester akhir tahun yang harus dilaporkan bulan Januari tahun berikutnya.

Dalam pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Pati menerapkan aplikasi berbasis online yakni SISKEUDES Online atau Sistem Keuangan Desa Online. SISKEUDES merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan desa agar penggunaan anggaran dana desa lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai regulasi yang ada.

Sistem Keuangan Desa Online menghendaki adanya transparansi dalam realisasi APBDes tiap tahunnya, Penggunaan teknologi informasi dalam suatu organisasi desa akan membantu desa dalam

melaksanakan tata kelola keuangan desa secara efektif dan efisien. Indikator suatu sistem informasi dikatakan efektif yaitu pertama, keamanan data. Data perlu mendapatkan keamanan dari bencana alam, tindakan yang disengaja ataupun kesalahan manusia dan tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam mengantisipasi *illegal access* dan kerusakan sistem. Kedua, kecepatan dan ketepatan waktu. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi dalam memproses data menjadi laporan baik secara periodik maupun non periodik dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Ketiga, ketelitian. Ketelitian berhubungan dengan kebebasan dalam kesalahan keluaran informasi. Kesalahan ada dua yaitu kesalahan pencatatan dan kesalahan perhitungan. Keempat, variasi laporan atau output. Berhubungan dengan kelengkapan isi informasi tidak saja mengenai volume tetapi juga informasinya. Tingkat kemampuan sistem informasi berbasis teknologi untuk membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi. Kelima, relevansi sistem menunjukkan manfaat yang dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penyajian data.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pati, khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Pati, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Tim Admin pengelola SISKEUDES Online, serta sampel satu desa yang taat dalam pengelolaan keuangan desa dan satu desa yang kurang dalam pengelolaan keuangan desa. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari wawancara dan studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan SISKEUDES Online di Kabupaten Pati

Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online ini mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang kini mengalami perubahan ke Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Pelaksanaan Aplikasi SISKEUDES Online di Tahun 2016 secara resmi sudah diimplementasikan di 401 desa di Kabupaten Pati, namun dalam pelaksanaannya masih secara manual. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Pati tetap melakukan pendampingan dan memfasilitasi desa dalam *input* menggunakan SISKEUDES Online.

Pada Tahun 2017, mulai melakukan pengadaan sarana dan prasarana dalam implementasi SISKEUDES Online diantaranya dengan melaksanakan Bimbingan Teknis SISKEUDES Online. Selain itu, pada akhir tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Pati sudah mulai melakukan penggabungan data

untuk SISKEUDES Online, yang sebelumnya semua desa masih melakukan input data secara manual, yakni dengan cara *import/eksport* data.

Pada tahun 2016-2018, Pengelolaan Keuangan Desa masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 yang kemudian mulai tahun 2019 sampai sekarang, pengelolaan keuangan desa sudah berdasar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara garis besar implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati di tahun 2018 sudah bisa dilaksanakan secara *online*, kemudian terdapat beberapa tahap didalam pelaksanaan SISKEUDES Online. Mulai dari tahap persiapan yang meliputi perencanaan anggaran kegiatan; kemudian pelaksanaan sosialisasi yang meliputi Bimbingan Teknis dan *Focus Group Discussion* (FGD); pendampingan desa, mulai dari Pemerintah Kabupaten Pati selaku implementor, kemudian pemerintah kecamatan yang memiliki wewenang terhadap desa, dalam hal ini pendamping desa yang membantu apabila didalam pengelolaan keuangan desa dengan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) mengalami kendala di dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa; tahap terakhir yaitu konsolidasi laporan keuangan APBDes pada setiap akhir tahun anggaran.

b. Evaluasi Implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati pada tahun 2018-2020

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Agar komunikasi menjadi efektif maka harus dipilih orang-orang yang tepat untuk menyampaikan dan menerima informasi agar informasi itu akurat.

Komunikasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam proses implementasi Aplikasi SISKEUDES Online yang pada tahun 2016 sudah memenuhi tiga prinsip di dalam komunikasi yaitu transmisi komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi komunikasi. Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini pihak yang bertanggungjawab sebagai implementor dari Aplikasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati bersama dinas terkait sudah melaksanakan proses Bimbingan Teknis kepada seluruh jajaran aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan didalam pengelolaan keuangan desa secara *online*.

Seperti yang diterapkan di Kabupaten Pati bahwa ketika Kementerian Dalam Negeri menerbitkan peraturan tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati selaku pengemban tugas didalam pengawasan

pengelolaan keuangan di desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa harus melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kejelasan tentang pembinaan dan pengawasan implementasi SISKEUDES Online didalam pengelolaan keuangan desa adalah jelas berdasar kepada Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019. Sebagai akibat dengan adanya bunyi pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah bersifat wajib.

Keberjalanan proses bimbingan teknis SISKEUDES Online di Kabupaten Pati ini sudah berlandaskan dasar hukum yang jelas, dimana pada Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 87 Ayat 2b dijelaskan bahwa Bupati berkoordinasi dengan APIP Daerah memberikan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan desa, administrasi keuangan desa, serta pada Pasal 87 Ayat 2a dijelaskan bahwa Bupati berkoordinasi dengan APIP Daerah memberikan pedoman mengenai APB Desa, dan pengelolaan keuangan desa.

Dalam hal ini konsistensi dalam pelaksanaan bimbingan teknis dan pemberian pedoman di dalam pengelolaan keuangan desa menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online sudah diatur dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019.

Dengan demikian dalam pelaksanaannya sudah didasarkan dengan kekuatan hukum yang jelas. Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati juga sangat terbuka dan bersedia membantu melalui pendamping desa di setiap kecamatan yang ditunjuk sebagai tim teknis tingkat kabupaten untuk membantu desa yang masih mengalami kendala di dalam menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online yang nantinya dikoordinasikan dengan BPKP selaku pengembang Aplikasi.

2. Sumberdaya

Jika melihat implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati pastinya dalam pelaksanaannya harus didukung dengan sumberdaya yang efektif dan efisien baik dari segi sumberdaya Aparatur Pemerintah Daerah dan Aparatur Desa maupun sumber daya secara material, serta sarana dan prasarana yang bisa melancarkan implementasi Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online dengan baik.

Pemerintah Kabupaten Pati telah berkomitmen untuk mensukseskan penerapan aplikasi SISKEUDES Online ke seluruh desa di Kabupaten Pati, hal ini dibuktikan dengan adanya anggaran yang meningkat secara signifikan dari tahun 2016-2019. Ini sebagai bentuk keseriusan serta komitmen Pemerintah Kabupaten Pati beserta OPD terkait sebagai pengemban tugas asistensi kepada desa.

Selain sumber daya material yang dibutuhkan untuk mengelola

SISKEUDES Online ini, faktor sumberdaya manusia yang merupakan salah satu tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam mengimplementasikan SISKEUDES Online, fakta di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan di dalam implementasi aplikasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati seperti adanya berbagai macam karakter dari Operator SISKEUDES, kemudian hambatan seperti Operator yang berganti-ganti dikarenakan adanya kondisi perpolitikan di tiap-tiap desa. Maka dari itu, di dalam pelaksanaan SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online dibutuhkan sumberdaya manusia yang mumpuni dalam bidang teknologi.

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana program akan sangat berpengaruh di dalam pelaksanaan program. Sikap pelaksana yang positif terhadap suatu program atau kebijakan akan memungkinkan pelaksanaan dengan sukarela sesuai aturan.

Munculnya implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online se-Kabupaten Pati menjadi bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sebagai pelayan masyarakat, apalagi melihat perlunya adanya peningkatan mutu di dalam pengelolaan keuangan desa secara online dan terintegrasi yang nantinya berpengaruh terhadap tanggungjawab aparatur desa didalam proses realisasi anggaran yang digunakan.

Preferensi kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang terkait dengan implementasi kebijakan yang efektif. Jika para

pelaksana memiliki kebijakan atau komitmen terhadap implementasi kebijakan maka kebijakan implementasi akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal.

Sehingga, implementor dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan beserta dinas terkait memiliki disposisi yang baik, maka akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga tidak berjalan efektif.

4. Struktur Birokrasi

Dua karakteristik birokrasi adalah SOPs (*Standart Operating Procedures*) dapat mempengaruhi implementasi, yaitu mempengaruhi perubahan-perubahan dalam kebijakan. Hal yang bisa terjadi adalah pemborosan sumber daya, peningkatan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan, menghambat koordinasi dan membingungkan para pelaksana di tingkat bawah.

Jika melihat implementasi Aplikasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati jelas dijalankan dengan payung birokrasi baik dari Pemerintah Pusat hingga daerah dan bekerjasama dengan instansi yang ada kaitannya dengan implementasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online. Hal inilah yang akan menunjukkan adanya perbedaan tugas dan fungsi setiap instansi.

Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan

Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 87 Ayat 2d bahwa monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Bupati Pati.

Pelaksanaan Implementasi Aplikasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati dalam tingkat kabupaten jelas memiliki SOP yang berbeda dengan tingkat di atasnya. Dengan struktur birokrasi yang memiliki kewenangan yang berbeda pula. Di Kabupaten Pati, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati sebagai pelaksana dalam administrasi juga mengawasi, Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dalam hal anggaran, Inspektorat yang mengurus dalam hal pengawasan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa serta bekerjasama dengan BPKAD (Badan Pengawas Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Pati yang bertanggungjawab kepada Bupati Pati melalui Sekretariat Daerah. Kemudian Dispermasdes Kabupaten Pati juga mengawasi terkait pelaksanaan Dana Desa, Anggaran Dana Desa, dan Dana yang di transfer dari Daerah, kemudian dari Kementrian Dalam Negeri melalui OM-SPAN (Online Monitoring–Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara) memonitor hasil *output* Dana Desa yang sudah terintegrasi dengan Aplikasi SISKEUDES Online.

Ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana kebijakan harus bisa mendukung

kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi baik dengan semua pihak yang terlibat.

c. Kendala Implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati

Sebagai implementor SISKEUDES Online, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati sudah berhasil menerapkan Aplikasi SISKEUDES Online di seluruh desa di Kabupaten Pati. Tetapi tidak jarang terjadi beberapa permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu kendala yang menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mulai dari Bimbingan Teknis adalah pada jumlah desa yang banyak dan dari karakter operator SISKEUDES yang bermacam-macam.

Sejak awal implementasi Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online ini Pemerintah Daerah Kabupaten Pati membentuk tim pengelola SISKEUDES Online dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pati. Pembentukan tim ini bertujuan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dapat dengan mudah mengontrol keberjalanan dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara *realtime* menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online.

Pengelolaan Keuangan Desa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online ini juga membutuhkan tenaga ahli atau Sumberdaya Manusia yang mumpuni di bidang teknologi dan menguasai dalam hal pengelolaan keuangan

desa dari mulai perencanaan hingga realisasi anggaran.

Sumber daya manusia memang faktor penting, namun perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam Implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati dibutuhkan *server* dan prasarana lain guna menunjang kelancaran dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online.

Dikarenakan jumlah desa yang banyak dan tersebar karena kondisi topografi di Kabupaten Pati yang terdiri dari pegunungan di wilayah selatan dan wilayah pesisir di utara, hal ini menyebabkan adanya kendala terkait sinyal/jaringan yang ada di desa-desa yang jauh dari pusat pemerintahan. Namun, permasalahan jaringan bisa diatasi dengan melakukan perluasan jaringan internet yang kuat dan disesuaikan dengan kondisi topografi wilayah.

Meskipun sudah dilakukan Bimbingan Teknis pada setiap awal Tahun Anggaran, masih ditemukan desa yang mengalami kesulitan didalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES Online. Akan tetapi kendala tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan dari pendamping desa dan tenaga ahli di tingkat kabupaten.

Dengan adanya pendamping desa dan admin SISKEUDES tingkat Kabupaten dan di tingkat kecamatan yang fokus membantu desa didalam pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online,

operator SISKEUDES Online di desa dapat menerima dan melakukan himbauan dengan baik dan benar, sehingga upaya untuk meminimalisasi kesalahan didalam pengelolaan keuangan desa dapat terlaksana dengan transparan, akuntabel dan taat anggaran.

KESIMPULAN

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati berperan aktif dan sebagai aktor utama didalam proses evaluasi implementasi aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online. Pemerintah Kabupaten Pati berkomitmen memperkuat desa dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya implementasi Aplikasi SISKEUDES Online di seluruh desa (401 desa) di Kabupaten Pati menjadi kebijakan yang sangat efektif dan efisien didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa secara online. Di tahun 2016 Kabupaten Pati bersama dinas-dinas terkait berhasil menerapkan Aplikasi SISKEUDES Online ke seluruh desa (401 desa) di Kabupaten Pati.

Komunikasi implementasi SISKEUDES Online di Kabupaten Pati sudah berhasil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis di tingkat kabupaten dan dilanjutkan di setiap kecamatan

untuk pelatihan lebih mendalam untuk para Operator SISKEUDES yang ada di seluruh desa (401 desa) di Kabupaten Pati.

Dari segi sumberdaya material sebagai penunjang implementasi SISKEUDES Online sudah terbilang optimal hal ini diperkuat dengan fakta dilapangan bahawa didalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Pati telah melakukan pengadaan sarana dan prasarana berupa *server* yang cukup besar sebagai data penyimpanan hasil laporan keuangan desa di Kabupaten Pati, kemudian Kabupaten Pati sudah mengeluarkan anggaran yang meningkat secara signifikan dari tahun 2016-2019. Namun dari adanya penerapan Aplikasi SISKEUDES ini, masih ditemukan hambatan dari segi sumberdaya manusia, maupun faktor eksternal yang tidak terduga yaitu ada operator SISKEUDES Online yang belum menguasai aplikasi secara keseluruhan dikarenakan belum memahami secara benar materi yang disampaikan saat Bimbingan Teknis, operator SISKEUDES Online yang sudah berumur atau sudah purna, kemudian adanya kondisi politik di suatu desa di Kabupaten Pati. Pemerintah Kabupaten Pati mulai maka dari itu pada tahun 2018, melakukan pengangkatan perangkat desa baru yang menguasai teknologi informasi maupun di bidang keuangan desa. Jadi diharapkan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh orang yang berkompeten di bidang tersebut, mampu mengoperasikan Aplikasi SISKEUDES Online dengan baik dan benar. Disposisi yang melihat pada karakteristik

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati dengan pihak-pihak terkait yang telah berupaya memberikan informasi terkait adanya implementasi Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online kepada seluruh Operator SISKEUDES yang ada di seluruh desa (401 desa) di Kabupaten Pati. Informasi dalam penyampaian pesan melalui bimbingan teknis serta memberi pedoman di dalam pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Pati sudah optimal.

Implementasi mekanisme pelaporan hasil capaian *output* keuangan desa, mulai dari proses *input* data sampai dengan proses *output*. Antara desa dengan Pemerintah Kabupaten Pati tidak ada kendala dari hasil capaian *output* pengelolaan keuangan yang sudah saling terintegrasi dengan Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten Pati dalam hal ini Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dan dinas-dinas terkait yang memiliki wewenang dalam hal pengelolaan keuangan desa.

Kemudian untuk sumberdaya material, sejak awal penerapan Aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) Online di Kabupaten Pati, selama ini tidak ditemui kendala, namun hanya beberapa masalah kecil dikarenakan jumlah desa yang banyak yaitu 401 desa, dan tersebar di beberapa wilayah yang secara topografi berbeda-beda, namun kendala ini dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, dengan memperkuat jaringan *internet* diseluruh desa di Kabupaten Pati supaya tidak muncul permasalahan seperti pelaporan

keuangan desa yang lambat dikarenakan lemahnya jaringan antar desa.

DAFTAR PUSTAKA

Dewanti (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Jurnal akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Faozi, C. (2015). *Undang-undang desa, apakah mimpi buruk bagi aparatur pemerintah desa?*. Available at <http://www.kompasiana.com>

Tanjung, A. H. (2000). *Akuntansi, Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Available at <https://swamandiri.wordpress.com>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014